



JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JMPIS)

E-ISSN : 2716-375X
P-ISSN : 2716-3768

<https://dinastirev.org/JMPIS>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i4>

Received: 31 Mei 2024, Revised: 28 Juni 2024, Publish: 1 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender di Partai Politik (Studi di Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan)

Adinda Tasya Azzahra Hasibuan¹, Elly Warnisyah Harahap²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, adindatasyaa8@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, ellywarnisyah@uinsu.ac.id

Corresponding Author: adindatasyaa8@gmail.com

Abstract: *The study aims to explore the role of women in the efforts to gender equality in the City of Medan's Party of Welfare Justice (PKS). The research method used is a political approach with qualitative analysis using data collection techniques of in-depth interviews of a number of women members of the PKS of the City of Medan. The results of the study reveal that women in the CCP have a significant role in the fight for gender equality, both in the political and social sphere. In addition, the findings of the study also identify the challenges and obstacles faced by women in their efforts to gender equality in the CMC of Medan. The research highlights the importance of a deeper understanding of the role of women in political and gender equality contexts, as well as providing valuable insights for more inclusive and sustainable policy development in the future.*

Keyword: *Role, Women, Gender Equality.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran perempuan dalam upaya mencapai kesetaraan gender di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan politik dengan analisis kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam terhadap sejumlah perempuan anggota PKS Kota Medan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perempuan dalam PKS memiliki peran yang signifikan dalam memperjuangkan kesetaraan gender, baik dalam ranah politik maupun sosial. Wawancara mengungkapkan pandangan mereka tentang bagaimana konsep kesetaraan gender dipahami dan diimplementasikan dalam konteks partai politik Islam. Selain itu, temuan penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh perempuan dalam upaya mereka untuk mencapai kesetaraan gender di PKS Kota Medan. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang peran perempuan dalam konteks politik dan kesetaraan gender, serta menawarkan wawasan berharga bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

Kata Kunci: Peran, Perempuan, Kesetaraan Gender.

PENDAHULUAN

Perempuan Indonesia tidak lagi terjebak dalam dunia kebodohan. Perempuan yang sebelumnya dilarang bersekolah dan hanya diperbolehkan mengurus rumah, memasak, menjahit, dan bersih-bersih kini dapat memanfaatkan kesempatan pendidikan. Tugas dan tanggung jawab seorang perempuan tidak hanya sekedar perannya sebagai ibu rumah tangga, namun, mereka harus bisa berbicara tentang kemajuan negaranya. Ada yang berpendapat bahwa keterwakilan perempuan dalam politik masih jauh dari harapan, namun perempuan yang ingin berkarir di bidang politik di Indonesia dibatasi oleh latar belakang budaya, norma gender, dan latar belakang mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa upaya telah dilakukan hingga saat ini untuk mengatasi masalah tersebut.

Di banyak kasus, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh posisi dan pengaruh dalam struktur partai politik. Pertama-tama, budaya patriarki yang masih kuat di banyak masyarakat menjadi penghalang utama bagi partisipasi politik perempuan. Norma-norma sosial yang menganggap peran politik lebih cocok untuk pria seringkali membatasi aspirasi politik perempuan dan mempersempit ruang bagi mereka untuk terlibat dalam kaderisasi partai politik.

Gagasan tentang kesetaraan gender telah tumbuh dan matang hingga berdampak pada transformasi di Indonesia. Salah satu modifikasi reformasi ini berkaitan dengan kerangka kerja yang berupaya memberikan perempuan kemampuan untuk lebih efektif melakukan advokasi kepentingan mereka di semua bidang kehidupan, termasuk politik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum telah melahirkan peraturan perundang-undangan yang berpihak pada perempuan menjelang pemilu 2004. Sesuai Pasal 65 ayat (1) UU tersebut, setiap partai politik peserta Pemilu diperbolehkan mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota masing-masing daerah pemilihan, dengan memperhatikan keterwakilan minimal 30% perempuan dalam posisi ini (Pahlevi & Rahim, 2023).

Perempuan sekarang memiliki lebih banyak kemungkinan daripada sebelumnya untuk berpartisipasi dalam politik berkat perlindungan yang disediakan oleh Akta Partai Politik dan Akta Pemilu. Dialog baru mengenai peran perempuan dalam komunikasi politik juga dipicu oleh diskusi publik mengenai keterwakilan perempuan dalam platform politik. Di banyak negara, termasuk Indonesia, membahas kehadiran perempuan dalam politik telah mendapatkan makna. Perempuan yang lebih terlibat dalam politik mungkin dapat mempengaruhi pilihan strategis pada hukum kesetaraan gender dan kemajuan hak-hak perempuan.

Perempuan Indonesia menghadapi sejumlah tantangan ketika ingin terlibat dalam dunia politik, yang diperumit dengan tantangan yang juga ada dalam lingkup domestik. Kendala ini tidak dapat dianggap remeh karena perempuan harus menyeimbangkan peran di kedua ranah tersebut dan tidak dapat mengabaikan satu di antaranya (Pania Putri & Purnama Wati, 2023).

Keterlibatan perempuan dalam panggung politik bukanlah fenomena baru di dunia, telah ada sejak zaman dahulu. Peran perempuan memiliki pengaruh besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pembahasan mengenai partisipasi perempuan dalam politik tetap menjadi topik yang relevan, baik di masa lalu, sekarang, dan kemungkinan akan terus diperbincangkan di masa yang akan datang.

PKS dipilih sebagai subjek penelitian karena merupakan partai kader dengan jaringan yang telah mapan. Sebagai hasilnya, PKS mengalami sedikit kesulitan dalam mencapai kuota 30% dan dianggap sebagai partai yang mendukung kesetaraan gender. PKS secara proaktif mempersiapkan kader perempuannya, baik dalam hal jumlah maupun kualifikasi. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hadir sebagai sebuah partai politik yang tampilannya berbeda dibandingkan dengan partai politik yang ada. Mengingat PKS sebagai partai politik tidak hanya mengedepankan aspek politis dalam sepak terjangnya, tapi juga menjadikan moral

agama sebagai basis gerakannya. Sehingga tidak jarang PKS dijuluki sebagai partai politik dakwah atau partai politik yang tampilannya lebih dirasakan sebagai gerakan dakwah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kader perempuan PKS mengembangkan interaksi dalam menjalankan tugasnya sebagai istri dan ibu di rumah sambil tetap berkorporasi di dunia politik, berdasarkan latar belakang fenomena yang telah dijelaskan. Kajian ini akan melihat bagaimana perubahan peran-peran tersebut akibat dari negosiasi dan manajemen komunikasi yang dilakukan kader perempuan DPD PKS Kota Medan dalam tatanan kehidupan berkeluarga.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan politik dengan analisis kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam untuk mengkaji bagaimana kontribusi perempuan terhadap kesetaraan gender di lingkungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan. Anggota partai perempuan, pengurus partai laki-laki dan perempuan, serta aktivis gender yang aktif dalam politik lokal menjadi subjek penelitian. Untuk mengetahui lebih jauh pendapat, pengalaman, dan sikap mereka mengenai peran perempuan dalam partai dan upaya mencapai kesetaraan gender, dilakukan wawancara semi terstruktur.

Langkah pertama dalam prosedur wawancara adalah mempersiapkan pertanyaan wawancaranya yang terkait dengan tujuan penelitian, seperti pengalaman khusus perempuan di partai, hambatan yang mereka hadapi, dan kebijakan partai mengenai gender. Dengan izin peserta, wawancara langsung dilakukan dan direkam untuk menjamin keakuratan data. Setiap wawancara berlangsung antara 45 dan 60 menit dan berlangsung di lokasi yang nyaman bagi peserta, seperti kantor partai atau lokasi lain yang netral.

Melalui analisis triangulasi data yang cermat, menunjukkan bahwa meskipun tidak keseluruhan kegiatan dan keputusan penuh dapat dilakukan, perempuan di PKS Kota Medan memainkan peran penting dalam kegiatan sosial dan kepemimpinan di semua tingkatan. Data menunjukkan bahwa partai-partai melakukan upaya besar untuk memajukan kesetaraan gender, namun terdapat perbedaan dalam keberhasilan penerapan kebijakan-kebijakan ini, dan diperlukan lebih banyak bantuan untuk mengatasi tantangan saat ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang peran perempuan dalam partai politik dan memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam PKS Kota Medan. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya sekadar menggambarkan masalah, tetapi juga menawarkan solusi yang konstruktif untuk meningkatkan kesadaran tentang adanya kesetaraan gender terutama di tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak Robbert Stoller memperkenalkan istilah gender kepada publik pada tahun 1968, istilah ini mulai dikenal secara luas. Gender berasal dari istilah bahasa Inggris “*sex*”. Dalam istilah awam, gender adalah konstruksi budaya yang mengarah pada perbedaan dalam mentalitas, perilaku, sifat emosional, peran, dan fungsi sosial. Studi gender dimasukkan dalam studi saat ini karena gender dikaitkan dengan adat istiadat yang dipahami dan dipraktikkan masyarakat yang diwarisi dari generasi sebelumnya. Menurut KBBI, kesetaraan gender didefinisikan sebagai serangkaian sifat yang diciptakan oleh proses sosial untuk menciptakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan (Susanti Hasibuan, 2022).

Kesetaraan gender adalah prinsip dan praktik yang memastikan bahwa individu dari semua gender memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang sama dalam segala aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan sosial. Ini berarti bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau identitas gender, dan setiap orang diperlakukan dengan adil dan setara, tanpa stereotip atau prasangka (Nurazizah & Ismahani, 2020). Kesetaraan gender juga mencakup pemberdayaan perempuan dan kelompok gender lainnya yang terpinggirkan, serta usaha untuk menghapus hambatan struktural dan budaya

yang menghalangi partisipasi penuh dan setara mereka dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan di mana semua orang dapat mencapai potensi penuh mereka tanpa hambatan yang disebabkan oleh gender (Pahlevi & Rahim, 2023).

Peran perempuan saat ini tidak hanya terpaku pada lingkup domestik, yang sebelumnya berkaitan dengan pengelolaan urusan rumah tangga. Dalam evolusi yang sedang berlangsung, peran perempuan mengalami perubahan menuju partisipasi yang lebih intens di luar rumah tangga. Partisipasi perempuan dalam kehidupan publik, khususnya di zaman modern dan globalisasi ini, tidak terbatas pada bidang politik, yang secara strategis mempunyai arti penting, namun juga mencakup bidang ekonomi.

Peran perempuan dalam konteks global partisipasi politik dan demokrasi memiliki dampak yang signifikan dalam memastikan representasi yang inklusif dan keadilan gender dalam pengambilan keputusan politik. Memahami peran ini sangat penting karena menyoroti ketidaksetaraan yang masih ada dalam lingkup politik dan mengidentifikasi cara-cara untuk mengatasi hambatan yang dihadapi perempuan dalam mencapai partisipasi politik yang penuh. Konsep gender dan perspektif feminis dalam analisis politik memainkan peran penting dalam mengeksplorasi dinamika kekuasaan, hubungan kekuatan, dan pengaruh sosial dalam politik (Aulia Ramadhanty et al., 2023).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu partai politik Islam yang aktif di Indonesia. Di Kota Medan, PKS memiliki sejarah yang cukup panjang dalam berkiprah dalam politik lokal. Partai ini mulai aktif di Kota Medan sejak awal tahun 2000-an, ketika Indonesia sedang memasuki era reformasi politik.

Pada awalnya, PKS Medan fokus pada upaya-upaya dakwah dan pemberdayaan masyarakat Islam di kota tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, PKS Medan semakin aktif dalam arena politik lokal, baik dalam pemilihan umum maupun dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Dengan platform politik yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, PKS Medan berupaya untuk memberikan alternatif pilihan politik kepada warga Medan yang mengidentifikasi diri mereka sebagai umat Islam (Nauri & Sari, 2020).

Sejak itu, PKS Medan telah menjadi salah satu kekuatan politik yang cukup signifikan di kota tersebut. Mereka terlibat dalam berbagai agenda politik dan pembangunan, serta berperan dalam mengawal kebijakan pemerintah setempat dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan. Meskipun mendapat dukungan dari sebagian masyarakat, PKS Medan juga menghadapi berbagai tantangan dan kritik dalam perjalanannya, seperti halnya partai politik lainnya di Indonesia.

Dalam wacana terkini, pembahasan mengenai keterlibatan perempuan dalam politik mencakup isu-isu kontroversial, terutama terkait dengan usulan kuota 30% dan isu-isu kesetaraan gender lainnya. Meskipun diakui secara hukum, wanita Indonesia telah diakui sebagai bagian yang berharga dari negara ini, tetapi isu-isu ini masih agak kontroversial. Meskipun terjadi peningkatan peraturan sebesar 30%, Salah satu negara di mana perempuan masih kurang diwakili dalam badan legislatif adalah Indonesia (Syafudin, 2021). Banyak faktor, seperti perbedaan budaya, kelemahan dalam undang-undang yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan, Partisipasi perempuan yang rendah disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk masalah gender, ketidakpercayaan masyarakat terhadap posisi mereka, prosedur pemilihan umum, dan kurangnya kemauan politik di pihak pemerintah dan partai politik, dan rendahnya status perempuan di lembaga legislatif. Meskipun peran perempuan semakin serupa dengan laki-laki seiring berjalannya waktu, tantangan ini masih terus ada.

Penting untuk diingat bahwa, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 27 (1) UUD 1945 perempuan dan laki-laki pada dasarnya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama di bawah hukum dan dalam pemerintahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan dalam PKS Kota Medan telah mengalami peningkatan signifikan, dengan lebih sedikit tantangan dalam mencapai kesetaraan gender. Wawancara dengan kader perempuan dan pengurus partai

mengungkapkan bahwa partisipasi perempuan dalam struktur kepemimpinan partai masih terbatas. Kata terbatas disini bukan berarti mereka tidak bisa ikut andil dalam beberapa keputusan. Kader perempuan disini masih diberi kebebasan dalam hak bersuara dan melakukan kegiatan asal tidak sampai diluar qodrat nya perempuan. Dan untuk pengambilan keputusan, mereka tetap dikasih ruang untuk mengeluarkan ide dan pendapat mereka, tetapi kembali lagi kepada *Qiyadah* (Pemimpin) PKS Kota Medan (Huriani et al., 2021). Sebagian besar perempuan yang diwawancarai merasa bahwa mereka sudah cukup dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting dan sering kali mereka mendapati peran dalam kegiatan administratif atau program-program khusus perempuan. Se jauh ini, kader perempuan di PKS Kota Medan tidak merasa ada hambatan dalam kesetaraan gender di PKS Kota Medan.

Profil Kader Perempuan dalam PKS Kota Medan

Dalam struktur organisasi PKS Kota Medan tahun 2024, jumlah dan posisi perempuan menunjukkan peningkatan yang signifikan. PKS telah berkomitmen untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan, baik dalam struktur organisasi maupun dalam pencalonan legislatif. Hal ini terlihat dari kehadiran beberapa kader perempuan yang menempati posisi strategis, seperti dalam Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Pakar, dan Dewan Penasehat. Posisi-posisi ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berperan dalam aspek administratif tetapi juga dalam pembuatan keputusan strategis yang mempengaruhi arah kebijakan partai.

Meskipun ada kemajuan, partisipasi perempuan di tingkat yang lebih tinggi seperti Ketua DPD masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk mencapai kesetaraan penuh. Kader perempuan di PKS Kota Medan terus mendorong peningkatan representasi mereka melalui berbagai program pengembangan kapasitas dan advokasi kebijakan yang lebih inklusif. Partai juga berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi perempuan melalui kebijakan internal yang mendorong keseimbangan gender dalam semua aktivitas partai (Haq, 2024). Dengan demikian, meskipun ada kemajuan signifikan, upaya untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih komprehensif dalam struktur organisasi PKS Kota Medan masih terus berlangsung.

Kader perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan memiliki latar belakang pendidikan tingkat lanjut, yang mencakup gelar sarjana dan pascasarjana di berbagai bidang seperti administrasi, pendidikan, dan hukum. Pendidikan mereka yang sangat baik membantu mereka memahami dan membuat kebijakan partai yang mempromosikan kesetaraan gender. Selain itu, latar belakang politik mereka yang beragam termasuk pekerjaan di pemerintahan daerah dan organisasi masyarakat memberi mereka perspektif unik dan kemampuan yang berguna untuk mengawasi jalannya partai dan mempromosikan hak-hak perempuan.

Kader perempuan PKS Kota Medan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan partai dan acara yang mempromosikan pemberdayaan perempuan dan keluarga. Mereka sering mengadakan pembicaraan, seminar, dan sesi pelatihan dengan penekanan pada kesadaran gender, pendidikan politik, dan pengembangan keterampilan (Rahman Bayumi et al., 2022). Pengalaman ini tidak hanya memperkuat posisi mereka dalam struktur partai, tetapi juga meningkatkan kontribusi mereka terhadap masyarakat luas, khususnya dalam isu-isu terkait hak-hak perempuan dan keluarga.

Peran dan Kontribusi Kader Perempuan PKS Kota Medan

Kader perempuan di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan memainkan peran penting dalam mendorong kesetaraan gender di dalam partai. Mereka aktif terlibat dalam berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan. Melalui pelatihan kepemimpinan, seminar, dan lokakarya, kader perempuan PKS Kota Medan membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan

yang diperlukan untuk berkontribusi secara signifikan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Mereka juga terlibat dalam berbagai kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan lainnya untuk ikut serta dalam politik (Saputra, 2023).

Selain itu, kader perempuan di PKS Kota Medan juga berperan dalam mengadvokasi perubahan kebijakan internal partai untuk lebih inklusif terhadap perempuan. Mereka bekerja sama dengan anggota partai lainnya untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang menghalangi partisipasi perempuan dalam berbagai tingkatan kepemimpinan (Nurhasanah, 2020). Melalui kerja keras dan dedikasi mereka, beberapa perempuan telah berhasil menduduki posisi strategis dalam partai, menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat, perempuan dapat berperan secara signifikan dalam politik. Upaya ini tidak hanya memperkuat posisi perempuan dalam PKS tetapi juga berkontribusi pada perubahan budaya dan persepsi tentang peran perempuan dalam politik di Kota Medan secara lebih luas.

Dari sudut pandang Islam, partisipasi perempuan dalam kesetaraan gender di PKS Kota Medan menonjolkan nilai-nilai keadilan dan proporsionalitas antara laki-laki dan perempuan yang sejalan dengan ajaran agama. PKS mengakui bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam Islam di semua bidang kehidupan, termasuk politik, sosial, dan ekonomi. Namun PKS juga menggarisbawahi betapa pentingnya memahami tugas masing-masing gender berdasarkan sifat dan qodratnya masing-masing (Inayati, 2022). Oleh karena itu, perempuan di PKS Kota Medan didorong untuk berkiprah di masyarakat dan selalu menjunjung tinggi norma-norma Islam, dengan mempertimbangkan qiyadah agama sebagai pedoman utama dalam hidup.

Di PKS Kota Medan, kontribusi perempuan terhadap kesetaraan gender juga merupakan cerminan upaya rekonsiliasi nilai-nilai Islam dengan masyarakat kontemporer. PKS menyoroti kesetaraan gender bukan bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan komponen penegakan prinsip-prinsip agama yang tidak lekang oleh waktu dan dapat diterapkan pada semua budaya. Oleh karena itu, perempuan di PKS Kota Medan diimbau untuk berpartisipasi aktif dalam perjuangan kesetaraan gender dengan tetap menjaga jati diri dan komitmen terhadap prinsip-prinsip Islam sebagai landasan moral dan etika dalam segala aspek kehidupan.

Upaya Kesetaraan Gender dalam PKS Kota Medan

Di Kota Medan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mengeluarkan sejumlah undang-undang dan inisiatif untuk mendorong kesetaraan gender di berbagai bidang masyarakat. Meningkatkan kesadaran akan nilai kesetaraan gender di seluruh lapisan masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan. Guna meningkatkan keterlibatan dan peran perempuan dalam berbagai disiplin ilmu, antara lain politik, ekonomi, dan sosial, PKS Kota Medan juga aktif menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya.

Selain itu, PKS Kota Medan juga mendorong adanya kebijakan yang mendukung perempuan dalam hal pemberdayaan ekonomi, seperti pemberian bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan bagi perempuan yang ingin berwirausaha. Program ini tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan, tetapi juga memberikan mereka kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam perekonomian keluarga dan masyarakat (Haq, 2024).

PKS Kota Medan juga terlibat dalam advokasi untuk penegakan hak-hak perempuan, termasuk melalui pengawasan terhadap implementasi kebijakan anti diskriminasi gender dan perlindungan terhadap perempuan dari berbagai bentuk kekerasan. Dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan gender, PKS Kota Medan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang adil dan merata bagi semua warga kota, tanpa memandang jenis gender (Huriani et al., 2021).

Tantangan dan Hambatan

Untuk mendapatkan kesetaraan gender yang diinginkan, perempuan di PKS Kota Medan masih harus mengatasi berbagai hambatan. Pandangan membatasi mengenai peran dan keterampilan perempuan dalam politik dan kehidupan publik secara umum merupakan salah satu kendala utama. Keyakinan tradisional yang membatasi perempuan pada tugas-tugas rumah tangga masih dapat menjadi hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, meskipun PKS telah berupaya untuk mendorong kesetaraan gender (Prami & Widiastuti, 2023).

Selain tantangan internal, perempuan di PKS Kota Medan juga menghadapi hambatan eksternal seperti diskriminasi masyarakat dan stigma terhadap perempuan yang terlibat dalam politik. Dalam upaya untuk mencegah mereka berpartisipasi dalam politik, tidak jarang politisi perempuan mengalami pelecehan atau intimidasi secara verbal dan fisik.

Terakhir, kebutuhan untuk mencapai keseimbangan antara peran politik dan tanggung jawab domestik juga merupakan tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam PKS Kota Medan. Sebagian besar perempuan politisi juga memiliki peran sebagai ibu dan istri di rumah tangga, sehingga mereka harus mengelola waktu dan energi mereka dengan bijaksana untuk dapat menjalankan keduanya dengan baik (Huriani et al., 2021).

Solusi Konstruktif Dalam Kesetaraan Gender di PKS Kota Medan

Dalam konteks Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Medan, terdapat beberapa solusi konstruktif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesetaraan gender. PKS dapat memperkuat program-program pemberdayaan perempuan dalam struktur partai dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan politik kepada perempuan, serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal maupun nasional. Selain itu, PKS juga dapat memperhatikan representasi perempuan dalam struktur kepemimpinan partai, termasuk dalam proses pencalonan dan pemilihan kandidat. Dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan dalam partai, PKS dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi aspirasi dan kebutuhan perempuan.

Adapun solusi konstruktif dari peneliti yaitu, PKS dapat:

1. Menjadi agen perubahan dalam masyarakat
Yaitu dengan mengkampanyekan nilai-nilai kesetaraan gender dan memperjuangkan kebijakan publik yang mempromosikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua gender.
2. Memanfaatkan platform politiknya
Yaitu untuk mengadvokasi isu-isu yang berkaitan dengan kesetaraan gender, seperti peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, dan peluang ekonomi.
3. Melakukan kolaborasi dengan lembaga-lembaga non-pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada pemberdayaan perempuan.

Yaitu guna memperkuat upaya bersama dalam mencapai tujuan kesetaraan gender.

Dengan langkah-langkah konkret seperti ini, PKS dapat menjadi motor perubahan yang positif dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan setara bagi semua warga, tanpa memandang gender.

KESIMPULAN

Peran perempuan dalam kesetaraan gender di PKS Kota Medan menunjukkan adanya upaya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan sekaligus tetap mempertahankan nilai-nilai keagamaan dan budaya yang menjadi landasan bagi partai tersebut. Dengan memberikan kebebasan kepada perempuan untuk membuat keputusan, PKS Kota Medan menegaskan pentingnya partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan sosial tanpa mengabaikan

prinsip-prinsip Islam yang menjadi panduan dalam keputusan mereka. Hal ini mencerminkan upaya untuk menciptakan kesetaraan gender yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan budaya yang dianut oleh masyarakat Kota Medan.

Meskipun memberikan kebebasan dalam membuat keputusan, PKS Kota Medan juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ajaran agama dalam setiap langkah yang diambil. Dengan demikian, perempuan dalam PKS Kota Medan diharapkan untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip qodrat (sifat alami) perempuan sebagaimana yang diatur dalam ajaran Islam, sambil tetap berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan tanpa batasan yang menghambat potensi mereka.

Dengan pendekatan ini, PKS Kota Medan berusaha menciptakan kesetaraan gender yang seimbang antara memberikan kebebasan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai dan kepatuhan terhadap ajaran agama sebagai pedoman utama. Dengan demikian, PKS Kota Medan berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan konteks budaya dan keagamaan yang ada di Kota Medan.

REFERENSI

- Amaliatulwalidain, dkk. (2022). *Peran Politik Perempuan Pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang*. JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK VOLUME 7 No. 1.
- Aulia Ramadhanty, Neysa Naila, & Ardli Johan Kusuma. (2023). Tantangan Dan Keberhasilan Peran Perempuan Dalam Partisipasi Politik Swedia Dan Implikasinya Terhadap Keadilan Gender Secara Global. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 106–119. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.627>
- Haq, V. A. (2024). Peran Kader Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Optimalisasi Partisipasi Politik Perempuan Melalui Program Pemberdayaan di Kota Depok Pasca Pemilu 2019. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 5(1), 28–45. <https://doi.org/10.33822/jpds.v5i1.7725>
- Huriani, Y., Dulwahab, E., & Annibras, N. (2021). Strategi penguatan ekonomi perempuan berbasis keluarga. In *Bandung: Lekkas*.
- Inayati, M. (2022). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Peran Perempuan Sebagai Kepala Sekolah Di Yayasan Ali Imron Pakamban Laok Pragaan Sumenep Tahun 2022). *Kartika : Jurnal Studi Keislaman*, 2(8.5.2017), 2003–2005. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>
- Nauri, F., & Sari, H. (2020). *Peran Politik Islam Terhadap Partisipasi Politik Perempuan DPD PKS Kota Sibolga Pada Pilkada 2020*.
- Nurazizah, F., & Ismahani, S. (2020). *Kodrat Wanita Dan Kesetaraan Gender Menurut Zaitunah Subhan Dalam Tafsir Kebencian (Studi Terhadap Qs. Al-Hujurat: 13)*. 248–253.
- Nurhasanah. (2020). Pemikiran Hamka dan Nasaruddin Umar dalam Kesetaraan Gender. *Al Tadabur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 05(02), 281–296.
- Pahlevi, R., & Rahim, R. A. A. (2023). Faktor Pendukung dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3(2), 259–268. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i2.26766>
- Pania Putri, C., & Purnama Wati, E. (2023). Caderization of Women in Political Parties As an Effort Towards the 2024 Elections. *Marwah Hukum*, 1(2), 27–31. <https://wri.or.id/editorial/361-keterwakilan->
- Prami, A. A. I. N. D., & Widiastuti, N. P. (2023). Peran Perempuan dan Kesetaraan Gender pada Sektor Ekonomi Kreatif di Desa Paksewali. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(1), 140–148. <https://doi.org/10.23887/jish.v12i1.54857>

- Rahman Bayumi, M., Alfit Jaya, R., & Zakat dan Wakaf, M. (2022). Kontribusi Peran Perempuan dalam Membangun Perekonomian sebagai Penguatan Kesetaraan Gender di Indonesia. *Al Huwiyah Journal of Woman and Children Studies*, 2(2), 30–42.
- Saputra, H. (2023). *PERAN PKS MUDA DALAM MENINGKATKAN BASIS MASSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (Studi Pada PKS Muda Kota Bandar Lampung)*.
- Susanti Hasibuan. (2022). Kesetaraan Gender Dan Dominasi Laki-Laki: Konstruksi Peran Perempuan Dalam Dakwah. *Al-Manaj : Jurnal Program Studi Manajemen Dakwah*, 2(02), 24–29. <https://doi.org/10.56874/almanaj.v2i02.1039>
- Syafrudin, I. (2021). Peran anggota badan legislatif perempuan dalam perspektif gender (study perilaku politik 2 anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia). *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 160–165. <https://doi.org/10.36805/civics.v6i1.1396>